

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sektor pariwisata merupakan sektor yang mampu mempengaruhi pertumbuhan perekonomian dan menjadi terobosan baru yang di sejajarkan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. Sektor pariwisata yang saat ini menjadi sektor penggerak ekonomi negara tentunya memiliki peran dan strategi yang berkaitan antara komoditas pendukung kepariwisataan seperti jasa transportasi, hiburan, akomodasi, restoran dan lain sebagainya, hal ini yang membuat sektor pariwisata menjadi salah satu pemacu pembangunan. Menurut (Paramarta et al., 2009) dalam undang-undang nomor 10 tahun 2009 kepariwisataan ialah merupakan bagian dari integral pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terpadu, terencana, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai agama, budaya, kelestarian lingkungan hidup dan keberadaan objek-objek wisata serta kepentingan nasional yang di dukung oleh ketegasan hukum dan konsistensi pemerintah terhadap komitmen menjaga keaslian dan keamanan objek wisata sesuai dengan Undang-Undang Kepariwisata pasal 27. Tujuan pariwisata adalah pembangunan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan berusaha dan memanfaatkan sumber daya alam serta sumber daya manusia dalam meningkatkan pendapatan ekonomi serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan local maupun nasional. Menurut (Suwantoro, 2009) dalam (Syah, 2017) pariwisata yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan ialah pariwisata budaya (*cultural tourism*), ekowisata (*ecotourism*), pariwisata bahari (*marine tourism*), pariwisata petualangan (*adventure tourism*), pariwisata agro (*agro tourism*), pariwisata pedesaan (*village tourism*), gastronomy (*culinary tourism*), pariwisata spiritual (*spiritual tourism*).

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu wujud dari pengembangan sektor pariwisata melalui otonomi daerah, sesuai dengan Undang-Undang no 06 tahun 2014 tentang pengembangan potensi aset desa

dan partisipasi masyarakat guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 30 tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten atau Kota kepada desa, yang berisi kewenangan desa dalam mengelola segala urusan desa termasuk pariwisata dan diperkuat dengan Undang-Undang No 06 tahun 2014 yang berisi kewenangan desa dalam mengelola dan mengurus segala urusannya sesuai batas wilayah yang diakui oleh sistem pemerintah NKRI. Hal ini menjadi pijakan awal dan memberi kesempatan Pemerintah Desa dalam mengembangkan wisata desa lokal. Desa wisata menurut Peraturan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata nomor 18 tahun 2011 adalah bentuk integrasi antara akomodasi, atraksi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku dalam suatu desa. Dalam mengembangkan desa wisata tentunya diperlukan kerjasama kemitraan antara Pemerintah Desa dengan pihak ketiga. Kemitraan atau *partnership* dikatakan sebagai hubungan yang terjadi antara pemerintah, sektor pariwisata dan masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama. Menurut (Khasanah, 2019), dalam konsep kemitraan terdapat persyaratan dan dasar untuk melakukan kemitraan yaitu adanya prinsip kepercayaan, kesetaraan, kemandirian dan saling menguntungkan (*win-win solution*) dimana masing-masing pihak bermitra harus mendapatkan keuntungan bersama dalam melakukan suatu kemitraan.

Desa Conto, merupakan desa yang berada di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri terletak di sisi selatan lereng gunung lawu, secara administratif Desa Conto terbagi menjadi 5 dusun yaitu dusun Sumber, dusun Nglarangan, dusun Dalisemar, dusun Ngelo dan dusun Kempul. Desa Conto merupakan desa di ujung utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Desa Conto memiliki potensi wisata alam yang perlu dikembangkan, wisata tersebut antara lain Goa Resi, Bukit Gendol, Soko Langit, Kebun Sayur Banteng dan Rumah Kopi (Rudi, 2021). Wisata-wisata tersebut merupakan wisata berbasis keindahan alam dan ilmu. Dalam pengembangannya tentunya Pemerintah Desa tidak tidak bisa bekerja sendiri

sehingga Pemerintah Desa bermitra dengan pihak ketiga untuk mengembangkan objek wisata tersebut menjadi paket desa wisata Conto.

Berdasarkan beberapa fenomena yang didapatkan peneliti melalui observasi, yang pertama desa wisata Conto ini meraih peringkat kedua (2) Desa Wisata terbaik di Jawa Tengah. Desa wisata Conto juga mendapat beberapa gelar juara dari berbagai kategori lomba, di antaranya juara pertama dalam kategori profil desa wisata dan juara kedua dalam kategori atraksi seni. Menurut Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jawa Tengah, Sinoeng N. Rachmadi, mengatakan bahwa event Gelar Desa merupakan bentuk apresiasi yang di berikan kepada desa wisata dan juga menjadikan upaya Pemrov Jawa Tengah dalam memajukan desa wisata di daerah. Desa Conto merupakan desa wisata yang dirintis sejak tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 mendapatkan Surat Keputusan dan pada tahun 2019 mendapat Surat Keputusan dari bupati Wonogiri (Imam Yuda Saputra, 2021). Fenomena yang kedua desa Conto yang berhasil masuk dalam tiga ratus (300) besar Anugrah Desa Wisata dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Khalid Yogi, 2021), selain itu hal menarik dari desa wisata ini adalah memiliki *destination branding* “Cinta Conto”, dimana *destination branding* ini mendefinisikan ciri khas bangga dan makmurnya masyarakat desa Conto dalam mengembangkan dan mengolah kekayaan alam yang sudah tersedia menjadi objek wisata. Selain itu pembuatan *destination branding* ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik untuk berkunjung ke desa Conto (Rudi, 2021).

Fenomena desa wisata Conto yang telah dijabarkan diatas banyak sekali mengandung manfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, namun dalam pelaksanaannya menjadikan desa wisata banyak sekali tantangan yang harus dilalui. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi covid yang telah berlangsung hampir dua tahun di Indonesia memberikan dampak kepada seluruh sektor kehidupan, termasuk pariwisata. Kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa diantaranya menurunnya partisipasi masyarakat karena terjadinya pembangunan saat pandemi Covid-19. Sebelum pandemi Covid-19 para pengunjung bisa menikmati paket wisata *live in* di rumah warga selama

beberapa hari, dengan belajar ilmu, budaya dan juga menikmati pemandangan alam. Namun saat pandemic Covid-19 tidak ada pengunjung pada saat itu partisipasi masyarakat menurun, di perlukan berbagai motivasi dan dukungan dari Pemerintah Desa untuk bisa meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat lagi, dan juga di perlukan pemasaran lagi oleh pokdarwis supaya wisatawan bisa berkunjung dan *live in*. Upaya tersebut masih dilakukan hingga saat ini. Selain itu di temukan juga kendala dalam hal meningkatkan inovasi-inovasi pariwisata di masa pandemi karena kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa, Pokdarwis maupun masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam hal ini di perlukan partisipasi, dukungan dari masyarakat dan penyediaan dana berkelanjutan dari Pemerintah Desa guna menyediakan sesuatu yang terbaik sesuai kemampuan berupa ikut menjaga keamanan, kelestarian, keindahan lingkungan serta menanamkan kesadaran masyarakat lain yang berkunjung dan wisatawan akan pentingnya pengembangan desa wisata.

Untuk menambah referensi dalam penelitian ini dan membandingkan masalah terkait, maka ada beberapa penelitian terdahulu yang dikutip, yaitu diantaranya sebagai berikut :

Dalam penelitian terdahulu berjudul Kemitraan Pemerintah Desa Mendak dan Perhutani dalam Pengelolaan Pariwisata, berkesimpulan bahwa pola kemitraan yang terjalin oleh Pemerintah Desa Mendak dengan Perhutani yaitu pola inti-plasma dengan system kerjasama bagi hasil dari pendapatan pariwisata yang sudah di atur dalam surat perjanjian kerjasama. Pihak perhutani selaku penyedia lahan mendapat 30%, pihak Pemerintah Desa atau BUMDes sebagai pelaksana dalam pengelolaan pariwisata medapat 65% dan LDMH 5%. Dalam penelitian ini di sebutkan bahwa terdapat faktor penghambat kemitraan dalam pengelolaan pariwisata yaitu kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa dan perhutani, serta kurangnya anggaran dana yang terbatas dan akses jalan menuju lokasi yang sempit dan lahan parkir yang kurang. (Pradana & Hilman, 2020)

Penelitian kedua yang berjudul Pola Kemitraan Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, berkesimpulan pola kemitraan yaitu sebagai suatu konsep kerjasama yang memiliki beberapa

model berdasarkan tingkat kesadaran pelaku dibedakan menjadi kemitraan semu, mutualistik dan konjugasi, sedangkan berdasarkan kesenjangan kedudukan azas kehidupan organisasi, meliputi model kemitraan gabungan *subordinatif*, gabungan linier dan kolaborasi linier. Pola kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Purbalingga dijelaskan sudah berjalan baik namun belum optimal. Hal tersebut ditandai beberapa faktor salah satunya pelaksanaan hak dan kewajiban oleh pemerintah daerah swasta dan masyarakat belum seimbang karena kurangnya rasa percaya diri dan rendahnya pemahaman. Jika ditinjau dari fenomena biologis kehidupan organisme model kerjasama yang dibangun pihak pemerintah dan swasta termasuk dalam model *Pseudo Partnership* atau kemitraan semu. Sedangkan jika ditinjau dari azas kehidupan organisasi termasuk dalam model *Subordinate Union Of Partnership* yaitu kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif. Faktor yang mempengaruhi pola kemitraan ini adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak, adanya harapan keuntungan, pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan. (Daraba et al., 2020)

Penelitian ketiga dengan judul Kerjasama Kemitraan Pemerintah Desa Ngindeng Dalam Mengembangkan Wisata Sejarah Rumah Singgah Jenderal Soedirman, berkesimpulan bahwa Pemerintah Desa Ngindeng bekerjasama dengan LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) cabang Ponorogo, masyarakat dan karang taruna dalam mengembangkan potensi wisata Rumah Singgah Jenderal Soedirman. Kerjasama tersebut menghasilkan pembangunan patung Jenderal Soedirman dan sebuah masjid diamping berdirinya monumen patung. Serah terima kemitraan tersebut dilakukan secara lisan dan tidak ada surat menyurat. Masyarakat dan karangtaruna desa Ngindeng menyediakan rumah yang di gunakan sebagai museum dan mempercantik tata ruangnya. Pengembangan dalam penelitian ini di jelaskan ada kendala yaitu berupa dana dan kendala terjadinya pembangunan karena Covid-19. (Prassada, 2021)

Dari studi penelitian terdahulu yang telah dilakukan di berbagai daerah mengenai kemitraan, hal ini telah memberikan gambaran mengenai model kemitraan dalam mengembangkan pariwisata dan berdasarkan fenomena yang

ditemukan dalam observasi, penulis menemukan beberapa fenomena menarik yaitu tentang pengelolaan dan model kemitraan bagi hasil yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Conto dan investor serta kerjasama dengan warga setempat dalam mengembangkan desa wisata dari banyaknya potensi wisata alam, yang terdiri dari Goa Resi, Bukit Gendol, Soko Langit, Kebun Sayur Banteng dan Rumah Kopi. Dan juga adanya fenomena yang jarang ditemui yaitu paket wisata live in di rumah warga serta *destination branding* “Cinta Conto” yang dimiliki Desa Conto, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “MODEL KEMITRAAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN SEKTOR PARIWISATA (Studi penelitian di Desa Wisata Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri)”. Dalam hal mengembangkan potensi wisata alam tentunya di perlukan kerjasama antara semua pihak, sehingga kajian ini menjadi penting supaya organisasi pemerintah lain bisa menjadikan pijakan atau perbandingan untuk kedepannya terutama dalam hal kemitraan pengembangan desa wisata dan mendorong partisipasi masyarakat supaya sadar akan potensi alam yang tersedia. Fokus kajian penelitian ini membahas tentang model kemitraan Pemerintah Desa dalam mengembangkan desa wisata dan sejauh mana kemitraan Pemerintah Desa dengan pihak lain, kemitraan dengan siapa saja peneliti akan meneliti dan menggalinya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut yaitu, bagaimana model kemitraan yang dijalankan Pemerintah Desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang model kemitraan Pemerintah Desa dalam pengembangan desa wisata, khususnya desa wisata Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) manfaat penelitian yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, teori baru maupun sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan pengetahuan khususnya pengetahuan tentang model kemitraan Pemerintah Desa dalam pengembangan desa wisata Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Serta menjadi sarana pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh peneliti.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi Pemerintah Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri dalam pengembangan sektor pariwisata di desa wisata, dan juga diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Desa.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menjadikan referensi atau teori dalam melakukan penelitian selanjutnya yang serupa dan diharapkan bisa memberikan gambaran umum tentang model kemitraan Pemerintah Desa dalam mengembangkan desa wisata khususnya dalam pengembangan desa wisata Conto.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Kemitraan

Kemitraan menurut (Kadek et al., 2017) bisa dikatakan sebagai sebuah hubungan yang terjadi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemitraan atau *partnership* membangun hubungan penting antara semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintahan di Indonesia secara berkelanjutan. Selanjutnya menurut (Sulistiani, 2017) kemitraan adalah partner, partner merupakan pasangan. Kemitraan adalah

suatu bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik.

2. Sektor Pariwisata

Dalam UU nomor 10 tahun 2009 disebutkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang telah dikunjungi untuk waktu tertentu.

3. Desa Wisata

Menurut (Istiyanti, 2020) desa wisata merupakan kawasan wisata yang berada di pedesaan, dengan seluruh suasana dan pemandangan yang khas dan asli. Menurut (Hadiwijoyo, 2012) Desa Wisata adalah suatu kawasan pedesaan dengan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, kehidupan sehari-hari, memiliki arsitektur bangunan serta struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembangkan.

F. LANDASAN TEORI

1. Kemitraan

Kemitraan dikatakan sebagai sebuah hubungan yang terjadi antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan bersama. Menurut (Adisasmita, 2010) dalam konsep kemitraan terdapat persyaratan dan dasar untuk melakukan kemitraan yaitu adanya prinsip yang saling menguntungkan (win-win solution), dimana masing-masing pihak bermitra harus mendapatkan keuntungan bersama dalam melakukan suatu kemitraan. Kemudian dalam Kuswidanti terdapat 3 kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing pihak bermitra yaitu:

a. Prinsip Kesetaraan (Equity)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.

b. Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

c. Prinsip Azas manfaat bersama (mutual benefit)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

(Adisasmita, 2010) juga menyatakan terkait bentuk-bentuk kemitraan dalam pemerintahan ada 9 yaitu sebagai berikut :

1. Bangun Operasi Serahkan (Build, Operate, Transfer atau BOT).

Pada bentuk kontrak kerjasama ini, pihak swasta melaksanakan proses kegiatan konstruksi termasuk proses pengoperasian dan pemeliharaan proyek. Proyek dioperasikan oleh pihak swasta selama jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati, setelah jangka waktu yang telah disepakati berakhir pihak swasta proyek harus menyerahkan seluruh fasilitas aset proyek kepada Pemerintah Daerah (BUMD) bersangkutan.

2. Bangun dan Serahkan (Build and Transfer)

Pada bentuk kontrak ini, pihak swasta melaksanakan konstruksi dan pembiayaan suatu proyek dalam suatu jangka waktu tertentu, yang disepakati dalam kontrak perjanjian, setelah konstruksi proyek selesai pihak swasta menyerahkan proyek kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam kontrak perjanjian. Bagi

Pemerintah Daerah, diwajibkan membayar pihak penyelenggara sebesar nilai investasi yang dikeluarkan untuk proyek ditambah nilai pengembalian yang wajar bagi investasi yang dilakukan.

3. Bangun Miliki Operasikan (Build, Own, Operate)

Pada bentuk kontrak ini swasta diberi kewenangan untuk membangun, mengoperasikan, dan memelihara fasilitas infrastruktur proyek sebagai imbalannya pihak penyelenggara diberi kewenangan untuk mendapatkan biaya pengembalian investasi, serta biaya operasional dan pemeliharaan dengan cara menarik biaya dari pemakai jasa fasilitas infrastruktur tersebut.

4. Bangun Milik Sewakan (Build, Own, Lease)

Pada bentuk ini swasta melaksanakan pembangunan diatas tanah Pemerintah Daerah, pihak swasta langsung memberikan proyek tersebut secara hibah kepada Pemda. Kemudian pihak swasta memperoleh hak opsi untuk menyewakan bangunan komersial tersebut.

5. Management Contract

Dalam bentuk kemitraan Management Contract ini, pemerintah mengalihkan seluruh kegiatan operasional dan pemeliharaan suatu kegiatan bidang tertentu kepada pihak swasta.

6. Service Contract

Dalam bentuk kemitraan ini, pemerintah menyerahkan suatu kegiatan pelayanan jasa tertentu kepada pihak swasta sedangkan pihak swasta harus memberikan jasa-jasa tertentu kepada pemerintah.

7. Bagi Hasil (Profit Sharing Arrangement)

Bentuk kemitraan ini hampir sama dengan bentuk Management Contract, hanya saja, pada bentuk bagi hasil ini selain memperoleh pendapatan dari jasa yang diberikan, pihak swasta juga berhak untuk menerima bagian tertentu dari keuntungan hasil yang diperoleh.

8. Leasing

Dalam bentuk ini, pemerintah menyewakan fasilitas-fasilitas tertentu kepada pihak swasta. Berbeda dengan Management Contract, perjanjian

jenis ini pihak swasta wajib memikul resiko komersial dari kegiatan yang dijalankannya.

9. Konsensi (Concession)

Dalam bentuk ini, pemerintah memberikan izin kepada swasta untuk melakukan suatu kegiatan eksploitasi tertentu dengan menanggung resiko komersial yang mungkin muncul, sedangkan pihak swasta dibebani kewajiban untuk membayar retribusi kepada pihak pemerintah.

1.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemitraan

Menurut (Manganang, 2013) ,mengenai faktor yang mempengaruhi kemitraan ini, Butler dan Waldroop, mengemukakan beberapa dimensi kemitraan hubungan kerja sebagai berikut :

1) Pengaruh

Professional yang menikmati pekerjaan mereka dan senang mengembangkan dan memperluas area pengaruh mereka. Mereka senang dalam hal persuasi, negosiasi dan memegang informasi dan ide-ide penting. Tipikal bagi negosiator pembuat kebijakan/keputusan.

2) Fasilitas interpersonal

Orang-orang yang senang dengan aspek interpersonal dalam situasi pekerjaan. Mereka secara intuitif berfokus pada pengalaman orang lain dan mereka bisa bekerja di belakang layar. Dengan cara ini mereka membuat rekan-rekan sekerjanya menjadi berkomitmen dan terikat untuk mengerjakan proyek dengan lancar. Tipikal bagi manajer SDM.

3) Kreativitas hubungan

Orang-orang yang bagus dalam membina hubungan dengan sekelompok orang melalui penggambaran visual dan verbal. Tipikal bagi orang-orang pemasaran dan manajer.

4) Kepemimpinan tim

Orang-orang ini ingin melihat orang lain dan berinteraksi dengan mereka. Mereka menyukai pekerjaan manajemen dan bekerja dalam tim

berenergi tinggi dalam situasi yang padat. Tipikal bagi manajer program dan manajer delivery

Berdasarkan uraian tentang kemitraan di atas menunjukkan bahwa pada hakekatnya kemitraan adalah suatu kerjasama dalam melakukan kegiatan usaha yang merupakan strategi usaha dengan tujuan mengembangkan usaha berdasarkan prinsip saling menguntungkan, saling menguatkan, dan saling membutuhkan. Dalam mengembangkan Sektor pariwisata di desa yaitu desa wisata tentunya pengelola membutuhkan kerjasama atau kemitraan dengan pihak lain, baik pemerintah kabupaten, swasta, investor, dan masyarakat sekitar. Disini Pemerintah Desa Conto bermitra dengan inverstor, swasta atau perorangan dan juga masyarakat setempat dalam mengembangkan desa wisata Conto.

2. Pengembangan Sektor Pariwisata

Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, kepariwisataan merupakan berbagai kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang telah disediakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Menurut arti luas, pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan jangka waktu tertentu. Kegiatan kepariwisataan dikembangkan di suatu daerah dengan alasan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan masuknya devisa bagi pemerintah daerah, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Pariwisata juga mendorong proses perlindungan terhadap suatu lingkaran sosial budaya maupun fisik dari masyarakat setempat, karena hal tersebut merupakan asset yang dapat di jual kepada wisatawan dan jika ingin berlanjut maka harus dipertahankan (Ahmar et al., 2012).

Pengembangan merupakan usaha untuk meningkatkan potensi wisata supaya menambah daya tarik wisatawan. Menurut peraturan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI pengembangan hendaknya berlandaskan pada kebudayaan nasional Indonesia sebagai visinya bahwa pembangunan untuk meningkatkan peradaban dan persatuan bangsa. Pelaksanaan

pengembangan pariwisata harus terencana secara terpadu dengan mempertimbangkan terhadap aspek social ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Pada setiap tahapan pengembangan tersebut, pelaku pariwisata hendaknya dapat meminimalisasi sebanyak mungkin dampak negative yang akan timbul serta berkaitan erat dengan perekonomian dan social budaya masyarakat setempat.(Hermawan, 2017) Jadi pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan objek wisata untuk dapat menarik wisatawan dan menambah pendapatan asli daerah dengan memperkenalkan dan memelihara kebudayaan masyarakat lokal di kawasan wisata tersebut. Dengan adanya promosi dan fasilitas yang baik akan menjadi daya tarik masyarakat lokal maupun masyarakat luar, maka tingkat pengembangan pariwisata diharapkan berkelanjutan. Dalam rumusan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI dirumuskan strategi pengembangan pariwisata, yaitu:

- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka kesempatan lapangan pekerjaan serta pemerataan di bidang pembangunan
- b) Mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberi manfaat pada masyarakat dan menjaga mutu lingkungan hidup
- c) Meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pasar
- d) Menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan pariwisata di Indonesia sebagai pendayaguna, produktif, transparan dan bebas KKN untuk melayani masyarakat.

3. Desa Wisata

Desa wisata merupakan desa yang dikembangkan menjadi sebuah objek atau tujuan pariwisata berdasarkan potensi alam yang ada. Pengembangan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga masyarakat setempat tanpa merusak alam dan budaya. Menurut Undang-Undang nomor 06 tahun 2016, Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.. Sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan atau kunjungan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk kegiatan rekreasi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata (Tinalah, 2021)

Menurut (Pitana & Diarta, 2009) destinasi adalah tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan tempat lain yang dilalui selama perjalanan (misalnya daerah transit). Sedangkan desa wisata dimaknai sebagai suatu bentuk integrasi antara atraksi wisata, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Pitana & Diarta, 2009) dan (Noor, 2016) Sehingga dapat disimpulkan kembali bahwa desa wisata merupakan sebuah destinasi wisata yang berbasis kehidupan pedesaan dengan daya tarik berupa alam, maupun kehidupan sosial dan budaya masyarakat, yang didukung sarana-prasarana wisata lokal oleh masyarakatnya.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah bagian yang menjelaskan mengenai variable yang ada di teori. Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep atau variable agar dapat diukur dengan cara melihat pada indikator suatu konsep atau variable (Noor, 2016). Definisi operasional dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana model kemitraan Pemerintah Desa dalam mengembangkan desa wisata sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kerjasama desa atas Prakarsa desa dengan pihak ketiga No 96 tahun 2017. Sehingga penelitian ini mempunyai indikator yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk kemitraan Pemerintah Desa Conto dalam mengembangkan desa wisata Conto
 - a. Proses kemitraan Pemerintah Desa Conto dalam mengembangkan desa wisata Conto:
 - a) Adanya prinsip kesetaraan (Equity)
 - b) Adanya prinsip keterbukaan

- c) Adanya prinsip azas manfaat bersama (mutual benefit)
- b. Aktor yang terlibat dalam kemitraan pengembangan desa wisata Conto
- 2. Faktor yang mempengaruhi kemitraan Pemerintah Desa dalam mengembangkan Desa Wisata Conto
 - a. Adanya faktor pendukung
 - b. Adanya faktor penghambat

H. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memaparkan serta menjelaskan kegiatan atau objek yang diteliti, yang berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Menurut (Suryaningsing, Oktavia; Nugraha, 2018) deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling atau penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut (Moelong, 2012) deskriptif kualitatif artinya data yang diperoleh dalam penelitian dilaporkan apa adanya kemudian diinterpretasikan secara kualitatif untuk mengambil kesimpulan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kawasan desa wisata Conto yang berada di Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Desa Conto dipilih karena memiliki beberapa objek wisata yang berbeda dengan desa wisata lainnya yaitu desa Conto menyediakan paket wisata *live in* di rumah warga dan edukasi alam menarik yang menjadikannya desa wisata yang maju.

3. Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Menurut (Prastowo, 2012) informan adalah orang pada latar penelitian. Pemilihan informan pada penelitian ini yaitu dengan teknik purposive sampling. Menurut (Herdiansyah, 2015) menyatakan bahwa teknik purposive sampling subjek penelitian yang dipilih haruslah memiliki keterikatan dengan tujuan penelitian, jadi teknik purposive ini merupakan teknik penentuan informan yang di dasari atas

pertimbangan tertentu dan yang menjadi sampel hanyalah sumber data cukup relevan. Peneliti memilih informan berikut karena dirasa informan tersebut berkaitan erat satu sama lain, dan informan inilah yang terjun secara langsung bersama masyarakat dalam mengembangkan desa wisata. Yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Pemerintah Desa, pengelola objek wisata, tokoh masyarakat dan pihak swasta atau investor. Berikut daftar informan pada penelitian ini:

Tabel 1. 1 Daftar informan pada penelitian

| Nama Informan | Jumlah | Alasan |
|-------------------------------|---------------|--|
| Kepala Desa | 1 orang | Selaku kepala desa Conto, yang mana beliau mengetahui tentang kemitraan yang dijalankan Pemerintah Desa Conto dan penyediaan tempat objek wisata serta juga beliau yang memberi keputusan tentang peraturan desa mengenai kerjasama objek wisata |
| Pengelola Goa Resi | 1 orang | Untuk mengetahui bagaimana model pengelolaan kemitraan dan pembagian hasil wisata Goa Resi dan Pemerintah Desa Conto |
| Pengelola Bukit Gendol | 1 orang | Untuk mengetahui bagaimana model pengelolaan kemitraan dan pembagian hasil wisata Bukit Gendol dan Pemerintah Desa Conto |
| Pengelola Soko Langit | 1 orang | Untuk mengetahui bagaimana model pengelolaan kemitraan dan pembagian hasil wisata Soko Langit dan Pemerintah Desa Conto |
| Pengelola Kebun Sayur Banteng | 1 orang | Untuk mengetahui bagaimana model pengelolaan kemitraan dan pembagian |

| | | |
|----------------------|---------|--|
| | | hasil wisata Kebun Sayur Banteng dan Pemerintah Desa Conto |
| Pengelola Rumah Kopi | 1 orang | Untuk mengetahui bagaimana model pengelolaan kemitraan dan pembagian hasil wisata Rumah Kopi dan Pemerintah Desa Conto |
| Tokoh Masyarakat | 1 orang | Untuk mengetahui informasi terkait kemitraan Pemerintah Desa dan investor serta dampaknya bagi ekonomi masyarakat |
| Swasta atau Investor | 1 orang | Untuk mengetahui modal awal dan pembagian hasil dengan Pemerintah Desa Conto |
| Pokdarwis | 1 orang | Untuk mengetahui pengelolaan paket wisata yang ditawarkan di desa Conto |
| Total | 9 orang | |

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi di lapangan dan dokumentasi. Data yang di dapat diolah hingga mendeskripsikan sebuah kesimpulan hasil penelitian yang berhubungan dengan kemitraan Pemerintah Desa dengan pihak ketiga dalam mengembangkan desa wisata di desa Conto. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data hasil wawancara bersama narasumber, yang berbentuk catatan tertulis maupun rekaman audio. Data sekunder merupakan data pendukung yang ada dengan mencari di dokumen arsip yang sudah ada (Sarwono, 2006).

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer dan data sekunder dalam penelitian menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

Mengumpulkan data primer digunakan teknik wawancara dan observasi sedangkan untuk data sekunder menggunakan teknik dokumentasi. Di antaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu arah pembicaraan tertentu terkait dengan permasalahan. Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan informasi dengan bertatap muka secara langsung untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti (Bungin, 2003). Metode wawancara ini ditujukan kepada kepala Desa Conto, ketua POKDARWIS, dan Pengelola setiap Kawasan wisata di desa wisata Conto.

b. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan atau penyelidikan kritis untuk memperoleh informasi yang baik tentang suatu masalah tertentu di suatu daerah tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mewakili daerah tersebut.. Observasi ini meliputi kegiatan pencatatan pada perilaku orang, objek dan kejadian-kejadian dalam suatu cara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang fenomena-fenomena yang diteliti (Amirullah, 2013). Jadi observasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh keterangan dan gambaran yang benar. Penulis menggunakan observasi dan pencatatan kegiatan dan wawancara tentang gambaran umum desa wisata

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode dengan cara melihat dokumen-dokumen yang telah dibuat. Dokumentasi bisa berupa dalam bentuk gambar, tulisan, atau karya-karya dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan menggunakan foto pada saat di lapangan, hal ini akan mendukung hasil wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Data disusun berdasarkan kategori lalu dijabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun ke dalam pola, milah dan membuat kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2014), model Analisa disebut sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data ini dilakukan selama jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan validasi data

b. Reduksi Data

Merupakan tahap pemilihan dengan pemikiran yang lebih mendalam. Hasil wawancara bisa di diskusikan dengan orang lain, sehingga peneliti dapat mengembangkan pemikiran dan data yang di reduksi memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

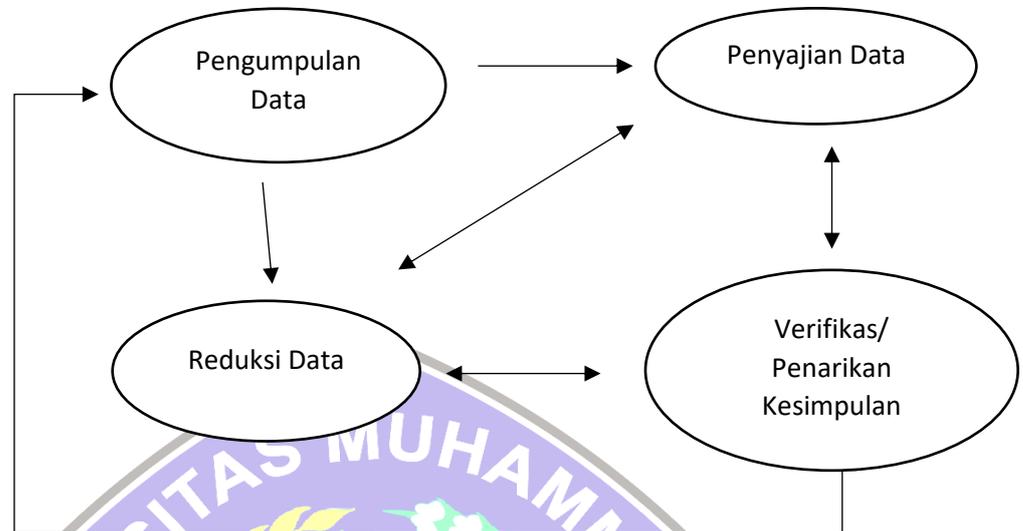
c. Penyajian Data

Setelah reduksi data, maka tahap selanjutnya ialah penyajian data. Penyajian data ini bisa berupa table, grafik, teks dan lainnya. Dengan penyajian data, maka akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta Tindakan kerja lanjutan dari apa yang dipahami tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga menjadi lebih jelas dan rinci. Penarikan kesimpulan merupakan penarikan arti dari data apa yang telah ditampilkan. Cara yang dapat dilakukan dalam proses penarikan kesimpulan adalah dengan melakukan pencatatan, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

Berikut skema proses dalam menganalisis data bentuk Miles dan Hurbemen : Gambar 1. 1 Alur tentang analisis data model Miles dan Hurbemen



Sumber : (Sugiyono, 2014)

7. Uji Keabsahan Data

Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Validitas dalam penelitian kuantitatif dilihat berdasarkan akurasi sebuah alat ukur yaitu instrumen. Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada apakah temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti. Menurut (Fauziyah, 2015) mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.

- 1) Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi

tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

- 2) Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
- 3) Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
- 4) Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Sampai data lengkap kemudian divalidasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini diharapkan data yang dikumpulkan memenuhi konstruk penarikan kesimpulan. Kombinasi triangulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan di lapangan, sehingga peneliti bisa melakukan

pencatatan data secara lengkap. Dengan demikian, diharapkan data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan (Fauziyah, 2015)

